



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah memfasilitasi rakyatnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara merata. Apalagi setelah dicanangkannya wajib belajar sembilan tahun. Semua warga negara wajib sekolah di usia dasar.¹ Demikian juga anak didik yang memiliki kebutuhan khusus tidak luput dari perhatian pemerintah. Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.²

Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni sekolah luar biasa (SLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), dan pendidikan terpadu.³⁴ Sekolah luar biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya⁵. Sekolah dasar luar biasa menampung berbagai jenis anak

¹ Indah Permata Darma and Binahayati Rusyidi, "Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia [The Implementation of Inclusive Schools in Indonesia]," *Prosiding KS:Riset & PKM 2*, no. 2 (2003): 223–27.

² Endro Wahyuno Endro Wahyuno, Ruminiati Ruminiati, And Sutrisno Sutrisno, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar," *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan 23*, No. 1 (2014).

³ Martini Janmaris, 2018, *Anak Berkebutuhan Khusus Profil, Asesmen dan Pelayanan Pendidikan*, Ghalia Indonesia, IKAPI, Jakarta, 33

⁴ Johandri Taufan and Fachri Mazhud, "Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Pendidikan 14*, no. 1 (2016).

⁵ Umbulharjo Yogyakarta, "Studi Kasus Proses Pembelajaran Inklusi di Tk Islam Pelangi Anak Negeri Umbulharjo Yogyakarta Case Study of Inclusion Learning Process in Tk Islam Pelangi Anak Negeri Umbulharjo Yogyakarta," 2013, 1020–29.



yang berkelainan menjadi satu sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, isalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya⁶

Dalam praktiknya semuanya dibuatkan kurikulum tersendiri sebagai penanganan berkebutuhan khusus dengan hambatan belajar yang hampir sama. Jadi, anak yang sekolah di lembaga pendidikan tersebut adalah mereka penyandang disabilitas dengan tipe yang bervariasi. Tidak ada peserta didik biasa atau reguler yang mendaftar di sekolah-sekolah tersebut dengan asumsi tidak ada kurikulum untuk reguler. Sekolah tersebut menjadi rujukan masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus saja.

Adapun pendidikan terpadu atau dapat disebut dengan pendidikan inklusi adalah sekolah reguler yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama⁷. Namun jenis ini biasanya masih hanya menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.⁸ Dalam perkembangannya kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini.⁹

Harapannya adalah seluruh anak dalam kondisi apapun diterima di lembaga pendidikan yang ada di sekitar rumahnya. Tetapi penanganan khusus untuk anak berkebutuhan khusus menjadi satu problematika tersendiri bagi lembaga pendidikan jika harus menjalaninya. Untuk mengembangkan kurikulum reguler saja lembaga pendidikan harus terus berbenah dan mengevaluasi banyak masalah demi kemajuannya apalagi harus menangani anak berkebutuhan khusus yang notabene membutuhkan pemikiran tersendiri selain tenaga dan biaya yang tidak sedikit tentunya.

⁶Marilyn friend and william D Bursuck,(2015) Menuju Pendidikan Inklusi, panduan Praktis untuk mengajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.; Kelas Iv Et Al., "Pola Komunikasi Nonverbal Guru Dalam Proses Belajar Mengajarbagi Siswa Tunarunggu di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Pekanbaruoleh : Septia Mantari Putri" 2 (2018): 5-14.

⁷ Program Studi, Pendidikan Matematika, And Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Pasca Implementasi Program Pendidikan Inklusi" 13, No. 1 (2012): 74-85.

⁸ Jati Rinarki Atmaja, 2018, Pendidikan dan Bimbingan Anak berkebutuhan Khusus, Remaja Rosdakarya, 56

⁹ Siti Hajar and M G Mulyani, "Analisis Kajian Teoretis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)," Jurnal Mitra Swara Ganesha 4, no. 2 (2017).

Jadi, lembaga pendidikan memilih untuk tidak menerima anak berkebutuhan khusus atau disabilitas karena harus kerja dua kali. Atau kalaupun terpaksa menerima anak bekebutuhan khusus, maka memaksakan kurikulum yang ada ketuntasan yang ada dan membiarkan anak berkebutuhan khusus berjuang mengejar sehingga efeknya tidak ada kenyamanan maupun keamanan baginya. Sehingga ujung ujungnya mereka dinaikkan dan ditunggu lulusnya saja.

Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.¹⁰ Dalam penjelasan ini peserta didik berkebutuhan khusus menjadi satu dalam kelas yang dihuni oleh peserta didik reguler dan mendapatka pelajaran yang sama, guru yang sama serta perlakuan yang sama pula. Sehingga tidak akan ada diskriminasi dalam lembaga pendidikan dengan asumsi bahwa semau anak yang ada di sekitar sekolah biasa dan boleh mengakses dengan bebas untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia karena semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai dengan filosofi bangsa yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika.¹¹ Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi pemerintah (negeri), ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya. Namun demikian, bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi belumlah memadai. Data tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa.¹² Jika dihitung jumlah ini masih

¹⁰ Amiroh Muntaz, "Proses Adaptasi Sosial Siswa Disabilitas dengan Siswa Nondisabilitas di Sekolah Inklusi (Studi Kasus pada Siswa Tunanetra dDi SMP Inklusi Taman Pendidikan dan Asuhan Kabupaten Jember)," 2015.

¹¹ Aini Mahabbati, "Pendidikan Yang Inklusif dan Menyenangkan" (Diakses Dari [Http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Aini ...](http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Aini...), 2012).

¹²Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 23, no. 4 (2016): 652-71. ; Rona Fitria, "Proses Pembelajaran dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus* 1, No. 1 (2012): 90-101.



sangat jauh dari kata cukup. Berarti masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengakses sekolah yang di dinginkan atau sekolah yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Perlu bagi pemerintah untuk memaksimalkan jumlah sekolah yang ada dan menjadikan sebagai sekolah inklusi dengan kurikulum dan penanganan yang dimaksimalkan dan dimudahkan.

Pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada anak berkelainan dan anak yang lainya yang selama ini tidak bisa sekolah karena berbagai hal yang menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan sekolah, seperti letak sekolah luar biasa yang jauh, harus bekerja membantu orang tua, dan sebab lainya seperti berada di daerah konflik atau terkena bencana alam. Sekolah inklusi bertujuan untuk memberi kesempatan bagi seluruh siswa untuk mengoptimalkan potensinya dan memenuhi kebutuhan belajarnya melalui program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan usianya dan perkembangannya. Pendidikan inklusi juga membuktikan bahwa mendidik anak dengan kebutuhan khusus bersama dengan anak normal menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan dengan berbagai jenis kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di perdesaan dan pusat-pusat perkotaan.¹³ Dengan demikian pendidikan inklusi masih banyak memerlukan perhatian yang sangat besar dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seperti dimanakan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, yakni sebagai berikut.

1. Ayat (1): "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".
2. Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".¹⁴

Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menyebutkan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan haknya dan Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim. Namun, Allah melihat hati

¹³ James J Lavelle et al., "Customer Injustice and Employee Performance : Roles of Emotional Exhaustion , Surface Acting , and Emotional Demands – Abilities Fit" XX, no. X (2019): 1-29, <https://doi.org/10.1177/0149206319869426>.

¹⁴ Sri Nurabdiah Pratiwi, "Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah," Jurnal Edutech Maret, 2016.

dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berikut ini

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: dari Abu Hurairah RA: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian.¹⁵

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empiris dan pragmatis.¹⁶ Bersifat empiris karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka, contohnya, budaya Jawa sangat kental dipegang oleh para orang tua.¹⁷ Kearifan local bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).¹⁸ Kearifan lokal yang peneliti gunakan adalah budaya Jawa yang meliputi tata krama, bahasa, unggah-ungguh, cara menghormati yang lebih tua.¹⁹ Dalam budaya Jawa hal tersebut sangatlah dibanggakan dan dihormati jika melekat pada diri seseorang.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan banyak hal tentang pendidikan, sisi lain dari pengetahuan adalah pembiasaan yang ditanamkan pada peserta didiknya. Seperti dilihat bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam kategori di atas rata rata dan di baah rata-rata, sehingga jika diterapkan kurikulum rata-rata maka sulit untuk mencapainya. Jadi, kebijakan menanamkan pembiasaan,

¹⁵Al Imam Abi Husain Muslim Bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar Ibnu Al Haitam, 2001), H. 655

¹⁶ Benjamin M Walsh et al., "Failing to Be Family-Supportive : Implications for Supervisors" XX, no. X (2018): 1–26, <https://doi.org/10.1177/0149206318774621>.

¹⁷ Nuriten Dinar et al., "Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 02, no. 1 (2016): 135, <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>.

¹⁸ Romadhani Ardi, Akhmad Hidayatno, and Teuku Yuri M. Zagloel, "Investigating Relationships among Quality Dimensions in Higher Education," *Quality Assurance in Education* 20, no. 4 (2012): 408–28, <https://doi.org/10.1108/09684881211264028>.

¹⁹ Dinar et al., "Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak."



karakter serta kemandirian atau sisi lain inilah yang akan menjadi prioritas dalam pendidikan inklusi. Contohnya, keluhuran budaya Jawa yang ditanamkan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang mungkin tidak memiliki harapan secara kognitif pada anaknya. Setidaknya mereka akan mengerti cara hidup bersama orang lain, melayani diri sendiri, sopan santun, serta mampu membaca diri saat bersama masyarakat lain. Nilai inilah yang akan menjadi alternatif penanaman karakter dalam pembelajaran inklusi.

Dalam kenyataannya dengan berbagai alasan banyak sekolah yang masih keberatan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus ini. Kalau pun ada terkadang pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan, yaitu sesuai dengan konsep pendidikan inklusi itu sendiri.²⁰ Selain itu, permasalahan-permasalahan teknis lain berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, masih banyak perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan.²¹ Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini ingin mencoba menelaah tentang desain pendidikan inklusi implementasinya di lapangan, serta evaluasi yang dilakukan di sekolah.

Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Lamong Badas Pare Kediri adalah madrasah ibtidaiyah swasta di bawah naungan Kemenag yang telah melaksanakan pendidikan inklusi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.²² Kontinuitas inilah yang menjadikan peneliti ingin mengetahui konsep dan desain yang digunakan sehingga bisa menjalankan pendidikan inklusi secara mandiri. Madrasah ini menjadi salah satu rujukan dari beberapa kota di sekitarnya. Dalam hal ini, manajemen pendidikan inklusi di madrasah ibtidaiyah ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah. Semua peserta didik berdampingan dalam komunikasi yang hangat dan nyaman, baik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler.²³

Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku Jombang adalah sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi secara bertahap dengan komitmen yang kuat melaksanakan pendidikan inklusi sejak sepuluh tahun yang

²⁰ anggoro Wulansari, "Pengaruh Penandaan (Signifikasi), Penguasaan Sumber Daya (Dominasi), dan Legitimasi Pendidikan Inklusi terhadap Inklusivitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surakarta Dalam Perspektif Guru" (Universitas Sebelas Maret, 2016).

²¹ Ery Wati, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Aceh" Xiv, No. 2 (2014): 368-78.

²² Wawancara dengan Kepala Madrasah via telephon 09 Maret 2019 07.00

²³ Wawancara dengan Mbak Ratna "wali murid MI YPSM Mangir Pare yang berasal dari Nganjuk" 02 maret 2019 :08:15

silam²⁴. Kesuksesan ini ditunjang dengan berdirinya PAUD dan TK Pelangi yang berada di sekitar sekolah dasar ini. Sekolah dasar reguler yang biasa menerima semua siswa yang datang untuk mendaftar, baik anak yang dalam kategori normal maupun yang dalam katagori kurang normal. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang menampung anak berkebutuhan khusus menjadi rujukan masyarakat yang anaknya tidak diterima di sekolah dasar yang lain.²⁵ Penanganan yang serius menjadikan para wali murid merasa puas atas hasil pendidikan yang di terima putra putrinya di Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku. Ada salah satu wali murid yng peneliti temui di Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang.

”Putri saya sudah lima tahun dan belum bisa mengucapkan kata apapun, Mbak. Setelah saya terapi kemana-mana dan terakhir terapi di Surabaya, direkomendasikan untuk menemui Kang Salis di Jombang dan akhirnya saya masukkan ke PAUD Pelangiku dan alhamdulillah sekarang sudah kelas dua dan sudah bisa berbicara banyak kata dan mulai bisa mandiri ²⁶“

Dari observasi yang dilakukan peneliti memang melihat ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus ikut bermain dengan anak normal saat istirahat sekolah.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui implementasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan oleh kedua lembaga pendidikan di atas yang berada di bawah dua kementerian yang berbeda. Integrasi pendidikan inklusi yang dipadukan dengan kearifan lokal menjadi salah satu daya jual yang menjadi ikon di dua sekolah yang akan diteliti, budaya Jawa yang syarat dengan tata krama atau unggah-ungguh yang bagus menjadi daya tarik para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di dua sekolah ini, baik bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus maupun orang tua yang anaknya normal.

24 Wawancara dengan kang Salis “ Kepala Sekolah SD Inklusi Pelangiku Jombang” 12 Maret 2019 :08:00

25 Wawancara dengan Bu Atika “ Guru kelas Inklusi di SD Inklusi Pelangiku Jombang” 12 Maret 2019 :09:00

26 Wawancara dengan Pak Mustofa dan istrinya“ Wali Murid SD Inklusi Pelangiku Jombang” 12 Maret 2019 :!0:09



B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah peneliti paparkan, maka yang menjadi fokus masalah dari penelitian ini adalah proses membuat konsep dan desain serta implementasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku Jombang. Selanjutnya dari fokus masalah, peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian yang akan peneliti kaji dan telaah untuk didapat hasilnya, sebagai berikut.

1. Bagaimana desain kurikulum pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar inklusi Pelangi di Jombang?
2. Bagaimana penerapan pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang?
3. Bagaimana evaluasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang?
4. Mengapa pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang berbasis kearifan lokal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yang didasarkan pada pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan desain pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang.
2. Mendeskripsikan penerapan pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang.
3. Mendeskripsikan evaluasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang.
4. Mendeskripsikan pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pesantren Sabilul Muttaqin Mangiran Pare Kediri dan Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku di Jombang yang berbasis kearifan local

D. Kegunaan Penelitian

Rencana penelitian disertasi ini diharapkan nantinya akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut.

1. Secara teoretis

Secara teoritis hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memperkaya dis kursus keilmuan tentang pengelolaan serta implementasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal baik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah naungan Kementerian Agama dalam mengelola lembaga pendidikan yang siap menyelenggarakan pendidikan inklusi.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kepala sekolah dan madrasah dalam membuat desain dan perencanaan yang matang serta mengimplementasikan pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi kepala sekolah atau kepala madrasah dalam mempersiapkan seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pendidikan inklusi yang berbasis kearifan lokal dimanapun berada dengan karakteristik lingkungan yang beragam maupun menyiapkan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara lengkap dengan desain yang baku.
- c. Hasil penelitian ini akan menjadi acuan bagi para guru inklusi ataupun *shadow* dalam melaksanakan pendidikan inklusi agar sesuai dengan yang diharapkan pada saat membuat desainnya.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah baik pemerintah daerah maupun kementerian agama dalam melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

E. Penegasan Istilah

a. Konseptual

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman, peneliti membatasi beberapa istilah sebagai penegasan, yaitu implementasi istilah ini peneliti gunakan karena menyangkut dengan pemahaman yang berkenaan dengan penerapan atau pelaksanaan.²⁷ Hal yang dimaksud

²⁷ Sutrisna Wibawa et al., "Implementasi Pembelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal," no. September (2007): 1-14.



dengan implementasi adalah menjemen kepala sekolah dan kepala madrasah dalam mengelola lembaganya mulai dari perencanaan pelaksanaan serta evaluasi. Pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler dan belajar bersama dengan anak biasa.²⁸ Jadi tidak terdapat diskriminasi di lembaga pendidikan yang mencanangkan pendidikan inklusi.

Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan kepala madrasah yang telah mencanangkan diri sebagai Lembaga penyelenggara pendidikan inklusi. Kepala sekolah sebagai *leader* yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kepala Sekolah Sekolah Dasar Inklusi Pelangiku Jombang dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah YPSM Kediri.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empiris dan pragmatis.²⁹ Bersifat empiris karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Kearifan lokal yang peneliti gunakan adalah budaya Jawa yang meliputi tata krama, bahasa, unggah-ungguh, cara menghormati yang lebih tua dalam budaya Jawa, kecenderungannya terhadap budaya islami sesuai dengan lingkungan lembaga yang berada di lingkungan pondok pesantren.

2. Operasional

Hal yang peneliti teliti adalah penerapan atau implementasi pendidikan inklusi berbasis kearifan lokal. Berdasarkan dari implementasi, hal selanjutnya yang menyangkut tentang apa yang diterapkan atau dilaksanakan, yaitu diawali dengan desain pendidikan

²⁸ Kate McAnelly and Michael Gaffney, "Rights, Inclusion and Citizenship: A Good News Story about Learning in the Early Years," *International Journal of Inclusive Education* 3116 (2019), <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1629123>.

²⁹ Imam Sutiyitno, "Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal Imam," *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, No. 1 (2012): 1–13, <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094>.

inklusi berbasis kearifan lokal oleh dua lembaga pendidikan. Kemudian implementasinya di lapangan serta evaluasi pendidikan inklusi sebagai sebuah desain lengkap untuk pelaksanaan sekolah inklusi bagi sekolah lain yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Desain yang sempurna yang akan menghantarkan pada kesempurnaan program pendidikan inklusi ini. Semua hal yang berhubungan dengan desain, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan inklusi menjadi data penting disini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai alur penulisan disertasi ini, dijelaskan sebagai berikut.

Bagian I, yaitu bagian pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dalam penulisan disertasi yang memuat alasan-alasan penelitian dan hal-hal yang akan diteliti. Bagian ini akan memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

Bagian II, yaitu bagian kajian pustaka yang merupakan bagian penyajian konsep atau teori-teori sebagai pisau analisis. Teori-teori yang sajikan sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang dikaji, yaitu teori yang berkenaan dengan pendidikan inklusi dan tentang kearifan lokal.

Bagian III, yaitu bagian metode penelitian yang merupakan bagian tentang cara penelitian dilakukan, mulai dari rancangan penelitian yang berisi jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data yang dikumpulkan.

Bagian IV, yaitu bagian paparan data dan temuan penelitian. karena paparan data sangat penting untuk analisis data selanjutnya maka bagian ini sesuai dengan data yang dikumpulkan.

Bagian V, yaitu bagian pembahasan yang merupakan bagian pembahasan atas paparan data dan temuan penelitian berdasarkan dengan teori-teori yang diajukan. Pembahasan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan.

Bagian VI, yaitu bagian penutup yang menjadi bagian akhir dari disertasi yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran dari penelitian disertasi yang dilakukan.

